

**EFEKTIVITAS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN,
DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**



Skripsi

Rara Ayu Ramadhona

NIM. 01031381419144

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EFEKTIVITAS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN
PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Disusun Oleh:

Nama : Rara Ayu Ramadhona
NIM : 01031381419144
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal

: 14/5/18

Ketua:



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.

NIP. 195808281988101001

Tanggal

: 17 Mei 2018

Anggota:



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 196409031994032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN
PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH

Disusun Oleh:

Nama : Rara Ayu Ramadhona
NIM : 01031381419144
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 29 Juni 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 17 Juli 2018

Ketua

Anggota

Anggota



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.
NIP. 195808281988101001




Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si.Ak.
NIP. 196409031994032001



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP : 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rara Ayu Ramadhona

NIM : 01031381419144

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.

Anggota : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.

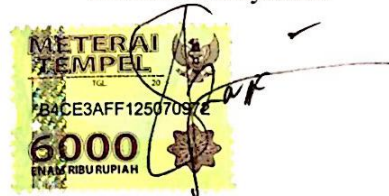
Tanggal Ujian : 29 Juni 2018

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 17 Juli 2018

Pembuat Pernyataan



Rara Ayu Ramadhona

NIM. 01031381419144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Katakanlah (Muhammad), “wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu”, Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas”

(QS. 39:10)

“Don’t lose hope, nor be sad...”

(QS. 3:139)

“Today was not easy, and what comes next won’t be easier. This is how we survive the world: mind, all the way open. Heart, half way shut.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Bapak dan Ibu sebagai sumber energi saya
Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dalam ruang lingkupnya membahas Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu tambahan informasi untuk semua pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Rara Ayu Ramadhona

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah”. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Arista Hakiki, S.E. M.Acc., Ak., CA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Harun Delamat, M.Si., Ak., Pembimbing Akademik.
5. Dosen Ketua Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak. yang telah sabar membimbing serta memberikan waktu, saran, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak. yang telah sabar membimbing serta memberikan waktu, saran, dan banyak dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Dosen Penguji Ujian Seminar Proposal, serta Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak. dan Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E.,MBA., Ak., sebagai dosen penguji Ujian Komprehensif atas kesabaran dan keikhlasan menguji penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas segala bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga Allah membalas budi baik Bapak dan Ibu menjadi keberkahan dan amalan yang tak akan terputus.
9. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
10. Kepala objek penelitian, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian. Serta Bapak Eman Satria, S.E., M.M., Ak., CA., yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Orang tuaku tercinta, Ibu Uliana dan Bapak Arief, keluarga besar Moch. Zuli dan Muhammad Sahur, serta saudara-saudara yang telah menjadi sumber semangat serta senantiasa memberikan segala dukungan dan doa sebagai bentuk cinta yang nyata.
12. Seseorang yang telah bersedia, setia, dan selalu ada untuk menjadi tempat berkeluh-kesah dan berbagi asa.

13. Sahabat-sahabat dan teman dekat yang telah menjadi mentor, motivator, penyemangat serta penyelamat selama masa perkuliahan di Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
14. Teman-teman seperjuangan konsentrasi penelitian Akuntansi Sektor Publik yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat masa sekolah yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh-kesah dan selalu memberikan dukungan moril kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

ABSTRAK
Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan
Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

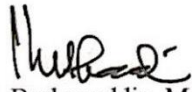
Oleh:
Rara Ayu Ramadhona

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah perlakuan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah efektif dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder yang berupa wawancara dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014, 2015, dan 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

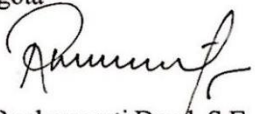
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori belum efektif. Dapat dilihat dari kesalahan pada pengakuan Pendapatan Asli Daerah untuk Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang berdampak pada kekeliruan untuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah*

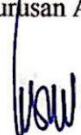
Ketua


Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.
NIP. 195808281988101001

Anggota


Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si.Ak.
NIP. 196409031994032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP : 197303171997031002

ABSTRACT
**Effectiveness of Recognition, Measurement, Presentation, and Disclosure
of Region Own Source Revenue Accounting of South Sumatera
Province based on Government Accounting Standard**

By:
Rara Ayu Ramadhona

Law Number 33 Year 2004 regarding Financial Equilibrium states that the region own source revenue (PAD) is a Regional Revenue derived from the Regional Tax Result, Regional Retribution Result, the result of separated Regional Property Management, and Other legitimate region own source revenue. The purpose of this study is to assess whether the treatment of Region Own Source Revenue Accounting of South Sumatera Province on Audited Budget Realization including recognition, measurement, presentation, and disclosure has been effective and in accordance with Government Accounting Standards. Qualitative descriptive research type. The data used are Primary and Secondary data in the form of interviews and Audited Budget Realization of Regional Government of South Sumatra Province in 2014, 2015 and 2016. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the recognition, measurement, presentation, and disclosure of accounting for the region own source revenue is in the category not effective yet. It can be seen from the mistake in the recognition of the Region Own Source Revenue for Local Taxes and the Results of Management of Separated Regional Wealth, which affects the error for the measurement, presentation, and disclosure of the Region Own Source Revenue in the Regional Audited Budget Realization of South Sumatra Province.


Keywords : *Effectiveness, Region Own Source Revenue, Government Accounting Standard*

Chairman



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.
NIP. 195808281988101001

Member



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si.Ak.
NIP. 196409031994032001

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP : 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Rara Ayu Ramadhona
NIM : 01031381419144
Jurusan : Akuntansi
Judul : Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Palembang, 17 Juli 2018

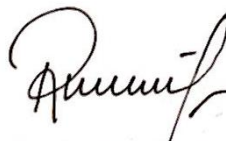
Pembimbing Skripsi:

Ketua

Anggota



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak.
NIP. 195808281988101001



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si.Ak.
NIP. 196409031994032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.

NIP : 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP



Nama : Rara Ayu Ramadhona
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Februari 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Sungai Sahang No.5112 RT.059 RW.014
Lorok Pakjo Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan
Alamat *email* : rarayuradhona@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun 2002 - 2008 : SD Negeri 21 Palembang
Tahun 2008 - 2011 : SMP Negeri 45 Palembang
Tahun 2011 - 2014 : SMA Negeri 10 Palembang
Tahun 2014-2018 : Universitas Sriwijaya

Pendidikan non-formal

Tahun 2015 : Kursus TOEFL LBPP LIA Palembang
Tahun 2016 : Kursus Akuntansi Prospek
Tahun 2016 : Kursus Brevet AB Pajak Terapan IAI Wilayah Sumsel

Pengalaman Organisasi

Tahun 2014-2016 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA)
Tahun 2016-2017 : Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Unsri
Tahun 2017-sekarang : Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan

Pengalaman *Internship*

April 2018 : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5.2. Rancangan Penelitian.....	9

1.5.3.	Jenis Data	10
1.5.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5.	Teknik Analisis Data	11
1.6.	Sistematika Penulisan	12

BAB II TEORI DAN STUDI KEPUSTAKAAN

2.1.	Teori Dasar Penelitian.....	14
2.1.1.	Teori <i>Agency</i>	14
2.1.2.	Teori Kepatuhan	18
2.1.3.	Hubungan Teori <i>Agency</i> dan Teori Kepatuhan dengan Penelitian.....	19
2.2.	Studi Kepustakaan	21
2.2.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
2.2.2.	Akuntansi Pendapatan Daerah	27
2.2.2.1.	Akuntansi Pendapatan LRA	27
2.2.2.2.	Akuntansi Pendapatan LO	31
2.2.3.	Pendapatan Investasi	38
2.2.4.	Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/ Pemanfaatan Aset Tetap	41
2.3.	Pendapatan Asli Daerah.....	43
2.3.1.	Definisi Pendapatan Asli Daerah	43
2.3.2.	Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	44

2.3.2.1. Pajak Daerah	45
2.3.2.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47
2.4. Penelitian Terdahulu	49
2.5. Kerangka Konseptual Penelitian	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	55
3.2. Visi dan Misi	56
3.2.1. Visi	56
3.2.2. Misi.....	56
3.3. Tujuan dan Sasaran	57
3.4. Struktur Organisasi	57
3.5. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	58
3.6. Data Personalialia	64
3.7. Struktur Organisasi BPKAD	65
3.8. Basis Akuntansi Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan	67
3.9. Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan dalam Pelaporan Basis Kas (<i>cash basis</i>)	69
3.10. Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan dalam Pelaporan Basis Akruwal (<i>accrual</i>)	70
3.10.1. Akuntansi Pendapatan LRA	70

3.10.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO	72
---	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pajak Daerah	77
4.2. Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3.2.1. Jenis Pendapatan Asli Daerah dan Kewenangan Laporan	45
Tabel 2.3.2.1. Jenis Investasi menurut PSAP Nomor 6	48
Tabel 3.6.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Kategori.....	65
Tabel 4.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2014	77
Tabel 4.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2015	78
Tabel 4.1.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2016	78
Tabel 4.1.4. Rincian Piutang Pajak Daerah Sumatera Selatan	80
Tabel 4.2.1. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2014	89
Tabel 4.2.2. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015	90
Tabel 4.2.3. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016.....	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.5.1. Kerangka Konseptual Penelitian	54
Gambar 3.7.1. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	66
Gambar 4.1.1. Keterkaitan antara LO, LRA, dan Neraca	88
Gambar 4.2.1. Keterkaitan antara LO, LRA, dan Neraca	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.....	104
Lampiran 2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	108
Lampiran 3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016	115
Lampiran 4. Laporan Singkat Satu Jenis Harta Kekayaan Pemda Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan besar semenjak terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah.

Pada tanggal 13 Juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 ini menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan daerah.

Pada masa ini, basis pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan *cash basis toward accrual*. Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, maka pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi. Tahapan atau proses penyusunan laporan keuangan pada masa ini, yaitu proses penyusunan laporan keuangan di SKPD selambat-lambatnya selesai pada tanggal 28 Februari. Selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret SKPKD sudah harus menyelesaikan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, sebelum

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan direvisi oleh Inspektorat Daerah.

Masa selanjutnya adalah masa transisi dari penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual. Regulasi yang mengatur perubahan ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2014. Terhitung hingga saat ini, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah berjalan selama tiga tahun. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan penerapan SAP tersebut, pemerintah pusat telah membangun sistem akuntansi berbasis komputer untuk menyelenggarakan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan di seluruh kementerian atau lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Akuntansi berbasis akrual berarti bahwa pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2012).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (wikiapbn.org)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran I.02, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan tersebut adalah hasil akhir dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dalam satu periode akuntansi.

Dalam komponen laporan keuangan daerah, terdapat pos pendapatan daerah. Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil

Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sumatera Selatan sebagai daerah yang otonom telah mengemban tanggungjawab atas kinerja pemerintah provinsi sejak tahun 2005. Pembangunan fasilitas daerah telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan pembangunan tersebut, potensi pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang besar kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang khususnya bersumber dari pajak.

Pendapatan daerah Sumatera Selatan pada rancangan APBD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp6,26 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD 2015 yakni sebesar Rp6,86 triliun maka mengalami penurunan sebesar Rp603,44 miliar atau sekitar 8,79 persen. Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar Rp155,77 miliar atau sekitar 5,42 persen. Dalam nota keuangan disebutkan, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp86,41 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar Rp197,69 miliar, maka mengalami penurunan sebesar Rp111,28 miliar atau sekitar 56,29 persen. (antarasumsel.com, 2016).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Agustus 2017 telah memulai upaya menggali potensi pendapatan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan mengajak Sistem

Administrasi Satu Atap (SAMSAT) untuk menginventarisir seluruh data wajib pajak kendaraan bermotor yang tertunggak atau belum bayar pajak kendaraannya khususnya pajak kendaraan pemilik kendaraan bermotor kategori kendaraan mewah baik roda 2 dan roda 4 termasuk pajak kendaraan dinas yang dipergunakan oleh institusi pemerintah daerah dan kendaraan yang dipergunakan pejabat daerah dan para pengusaha yang ada di wilayah Sumatera Selatan. (pemprovsumsel.tribunnews.com, 2017).

Langkah yang dilakukan oleh Bapenda, sesuai dengan momentum terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2016 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Nomor Polisi dalam Provinsi dan Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang Mendaftar dan Mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan, yang juga disebut sebagai Pergub tentang pemutihan pajak. Namun, kesempatan pemutihan pajak tersebut tidak dilaksanakan maksimal apabila masih terdapat kesalahan pada proses akuntansi keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan.

Realisasi pemutihan pajak kendaraan yang tidak maksimal telah dibuktikan dengan hasil akhir pemutihan pajak yang telah dilakukan selama empat bulan yaitu dari bulan September hingga Desember 2016, setelah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2006 terbit pada tanggal 18 Agustus 2016. Persentase target tersebut hanya terealisasi sekitar 81,61 persen. Sampai dengan 31 Desember 2016, realiasi pembayaran pajak di Sumsel mencapai Rp2,3

triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun. Jumlah realiasi penerimaan pajak tersebut dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp849 miliar dari target yang berjumlah lebih dari Rp1 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp528 miliar dari target Rp741 miliar, PKAA sebesar Rp209 juta dari target Rp211 juta. (palembang.tribunnews.com, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara singkat penulis dengan KA. Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan BLUD Bidang Akuntansi di Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September 2017, ada tiga hal yang menyebabkan adanya masalah dalam laporan keuangan Provinsi Sumatera Selatan terkait Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Penyajian jumlah piutang pajak daerah diragukan validitasnya.
2. Pendapatan dari suatu perusahaan pada pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak disajikan dengan benar.
3. Terjadi salah saji pada penganggaran untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.

Penelitian ini adalah adaptasi dari Penelitian Soepriyanto (2011) yang berjudul Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia, yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan terhadap situs *website* pemerintah daerah, maka ditemukan 2 jenis informasi keuangan yang disajikan, yaitu informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya. Terdapat 57 pemerintah daerah yang menyajikan informasi keuangan di situs webnya dari 392 pemerintah daerah yang memiliki

situs web. Dari ke 57 situs web pemerintah daerah tersebut, hanya 9 pemerintah daerah yang menyajikan informasi laporan keuangannya sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), 40 pemerintah daerah menyajikan informasi APBD dan 8 pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan selain laporan keuangan menurut SAP dan informasi APBD. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya di situs web masih sangat kurang.

Penelitian lain sebagai rujukan penelitian oleh Pasambuna, dkk (2013) yang berjudul Pelaporan dan Pengungkapan Pos Belanja Modal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu, yang menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap. Pengakuan perolehan aktiva tetap dapat diperoleh melalui 5 cara, yaitu; 1. Perolehan dengan pembelian tunai, 2. Perolehan dengan pembelian angsuran, 3. Perolehan dengan pertukaran, 4. Perolehan dengan surat berharga, 5. Hibah/ sumbangan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis, yaitu apakah perlakuan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah efektif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah perlakuan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah efektif dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi S1 Universitas Sriwijaya.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai klasifikasi, prosedur akuntansi, dan pencatatan pendapatan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan agar terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Sebagai bahan acuan untuk membuat perbaikan dan kebijakan untuk bidang keuangan dikemudian hari.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup yang dibahas dibatasi pada bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian dapat mempengaruhi pengungkapan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini diartikan bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan data, dinyatakan dalam bentuk uraian, dan datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran. Prosedur

pemecahan masalah yang diteliti dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan kepustakaan, yang kemudian dianalisa dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan

1.5.3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara mengumpulkan keterangan melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan informasi yang relevan yang diperoleh melalui wawancara dengan Pejabat Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai mekanisme pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah di Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga melalui dokumentasi yang kemudian diolah sehingga dapat menjadi informasi yang dapat digunakan bagi peneliti. Pada penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan adalah:
 - a. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2016

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian, mengenai keadaan umum objek penelitian, dan kegiatan yang dilaksanakan pada objek penelitian. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui literatur buku ilmu pengetahuan, penelitian terdahulu, artikel pada media masa, serta situs online terkait objek penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan rancangan penelitian, metode kualitatif digunakan untuk menguraikan secara jelas dan terinci mengenai efektivitas akuntansi belanja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Data primer dan sekunder dikumpulkan sesuai dengan variabel penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahapan proses pemilihan, penyederhanaan data dengan tujuan untuk memilih informasi mana yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
2. Sajian data, sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, maka penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun

tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut untuk mendapatkan kejelasan dan menguatkan suatu gambaran yang telah ada

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan kesesuaian yang mungkin ada, alur dan mekanisme dari masalah yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan saran dan tindak lanjut atas temuan yang telah dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi dalam penelitian ini dan sistematika penelitian.

BAB II Teori dan Studi Kepustakaan

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, baik teori yang bersifat umum maupun teori yang bersifat khusus, yang terkait dengan topik penelitian.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan secara singkat mengenai sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengakuan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dari pokok-pokok sub bab hasil dan pembahasan yang tertulis dalam Bab IV, serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonie, Indah Natalia. (2016). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pemerintahan untuk Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sangihe Periode 2014*, Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Hal. 1229-1240 1240 ISSN 2303-1174, diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>,
- Adhya Tirta Sriwijaya, *Sejarah dan Tujuan*, <http://atspalembang.com/>, diakses 10 Januari 2018
- Direktorat Jendral Keuangan Daerah. 2014. *Modul 3 - 01. SAPD Pendapatan*
_____. 2014. *Modul 3 - 06. SAPD Piutang*
_____. 2014. *Modul 3 - 08. SAPD Investasi*
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah (2010). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Pemerintah 2010
- Kaligism Billclin., dan Stanley Kho Walandouw (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*, Jurnal EMBA Vol.4 Bo.3 Hal. 612-621 ISSN 2303-1174, diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua*
_____. 2016. *Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan NonPerpajakan*
_____. 2016. *Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan*
- Lalombombuida, Socrates., dkk. (2014). *Penerapan Akuntansi Pemerintahan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal EMBA Vol. 2 No.1 Hal 111-122 ISSN 2303-1174, diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>

- Napitupulu, Lucia Silveria dan Novi Budiarmo (2015). *Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado*, Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol. 3, diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Ningsih, Nurul Hutami. 2017. *Pengaruh Pengetahuan tentang Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berkonsep Value for Money dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di SKPD Kota Palembang*, Thesis. Universitas Sriwijaya
- Pasambuna, Nelby Triyana, dkk. (2013). *Pelaporan dan Pengungkapan Pos Belanja Modal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu*, Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 Desember ISSN 2303-1174, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications>,
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2016. *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2016 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Nomor Polisi dalam Provinsi dan Kendaraan Bermotor Nomor Polisis Luar Provinsi yang Mendaftar dan Mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan*
- Pemprovsumsel dan Advertorial. 2017. *Bapenda Sumsel Gali Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan R2 dan R4*, <http://pemprovsumsel.tribunnews.com/2017/08/26/>, diakses 25 Oktober 2017
- Portal Resmi Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, <http://bpkad.sumselprov.go.id/>, diakses 25 Oktober 2016
- Rahmawati, Ruswandi. (2009). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang*, diambil dari <http://repository.ipb.ac.id>
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- _____. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan*
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- _____. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- _____. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Pemungutan Pajak Daerah*
- Ritonga, Irawan Taufiq. dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Yogyakarta: LKMPD.
- Siregar, Beldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Basis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
- Soepriyanto, Gatot., dan Restya Aristiani. (2011). *Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi Pada Pemerintah Daerah Indonesia*. Binus Business Review Vol. 2 No. 1 Mei 2011: 192:201, diambil dari <http://journal.binus.ac.id/>
- Sudarwan dan Odi Aria Saputra. 2017. *Masa Pemutihan Pajak, Dispenda Sumsel Raup Rp 2,3 T*, <http://palembang.tribunnews.com/2017/01/03/>, diakses 25 Oktober 2017
- Suparni, M., dan Susilawati. 2016. *Pendapatan daerah Sumsel 2016 sebesar Rp 6,26 triliun*, <http://www.antarasumsel.com/berita/298602/>, diakses 25 Oktober 2017.
- Tania, dkk. (2016). *Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado*, Jurnal Bekkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No.04, diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Wikiapbn. *Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*, <https://wikiapbn.org/prinsip-akuntansi-keuangan>, diakses 18 April 2018